

PERGULATAN PEMIKIRAN ISLAM DI ACEH **(Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam** **di Aceh Pasca MoU-Helsinki)**

Syafieh

Abstrak

Typology thinking of Islamic society organizations in Aceh there are three types including the first typology of traditional Islamic thought. Community organizations are included in the thinking of traditional Islam in Aceh is 1) HUDA (Association of Acehnese Dayah Ulama), 2) MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh Darussalam), 3) NU (Nahdlatul Ulama), and 4) Al-Wasliyah, second, typologies of thought Modern Islam represented by Muhammadiyah, and the third, the typology of fundamentalist Islamic thought. Fundamentalist Islamic Thought in Aceh is represented by 1) Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) 2) The Islamic Defenders Front (FPI). However provide a typology of traditional Islam, modern Islam, and Islamic fundamentalist Islam to the community organizations in Aceh is irrelevant because the organization movement today is beyond the dichotomous typology.

Keywords:*Islamic society organizations, traditional Islam, modern Islam, and Islamic fundamentalist Islam*

A. Pendahuluan

Dalam 20 tahun terakhir, ada dua peristiwa sejarah penting terjadi di Aceh yang mampu merubah keadaan sosial politik masyarakat Aceh. *Pertama*, munculnya era reformasi di Indonesia yang berdampak pada masyarakat Aceh. semenjak pasca reformasi hingga sekarang Aceh telah mendapatkan payung hukum, mulai dari UU No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi daerah (Pelaksanaan syariat Islam), UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan yang terakhir UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pada rentang waktu tersebut politik dan kondisi sosial di Aceh mengalami perubahan yang sangat cepat.

Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Email: syaf_74@yahoo.com.

Kedua, penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik di Aceh. Perundingan itu tidak hanya menjadi angin segar kedamaian bagi rakyat Aceh, tetapi juga termaktub hak-hak rakyat Aceh yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Propinsi Aceh terkait dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Ada tiga poin utama dari MoU Helsinki tersebut bagi rakyat Aceh, yaitu, penerapan syariat Islam dan Lembaga Wali Nanggroe, pembentukan partai politik lokal, dan pembagian hasil minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen. Sementara pihak GAM sendiri bersedia untuk menanggalkan tuntutan merdeka dan bersedia membangun Aceh ke arah yang lebih baik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari kedua peristiwa sejarah tersebut yakni dibukanya kran reformasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), euforia kebebasan berpendapat dan berkumpul mencapai titik didihnya, hal ini juga berpengaruh pada perkembangan organisasi Islam di Aceh. Bak jamur di musim penghujan, banyak bermunculan organisasi-organisasi Islam dengan berbagai ideologi. Mulai dari yang lokal seperti Majelis Ulama Naggroe Aceh Darussalam (MUNA) dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), sampai yang trans-nasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dari yang tradisional sampai yang fundamentalis, menghiasi wajah reformasi di Aceh. Disamping memang di Aceh telah ada organisasi Islam jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan organisasi Islam ini sangat berperan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Melalui organisasi inilah, proses ideologisasi, pendidikan, dan perlawanan terhadap kolonialisme menemui titik relevansinya. Sekedar menyebut contoh, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama sampai pada Masyumi merupakan sederet organisasi Islam yang pernah menorehkan tinta sejarah bagi perjuangan kemerdekaan.

Teori mengenai pemikiran dan pergerakan yang berkembang di dunia Islam dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Ia menyebutkan bahwa pemikiran dan pergerakan yang berkembang di dunia Islam, ada empat tipologi pemikiran dan pergerakan Islam yang berkembang: 1) Revivalisme pra-Modernis, 2) Modernisme Klasik, 3) Neo-Revivalisme; 4) Neo-Modernisme (Rahman, Fazlur, 1985:20). Selain Fazlur Rahman, Nurchalish Madjid juga memetakan tentang pemikiran

dan pergerakan Islam yang berkembang di Indonesia (Nurcholish Madjid, 1992:122). Dalam pandangan Nurcholish Madjid Tipologi Pemikiran Islam di Indonesia terdiri dari beberapa tipe antara lain, *pertama*, pemikiran Islam tradisional yakni sesuatu yang alami, sebab di dalam suatu komunitas masyarakat pasti memiliki keragaman pemikiran, budaya, bahasa dan agama, *Kedua*, tipe modern menyerukan umat Islam untuk memberikan penalaran terhadap Islam, agar segera berkemas memajukan Islam dalam berbagai bidang, terutama dalam melakukan gerakan reformasi dalam bidang social dan moral. *Ketiga*, neo-modern yakni dipandang sebagai gerakan intelektual yang mencoba menggugat, bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern, dan *keempat*, Pemikiran Islam multikulturalisme yakni secara fenomenologis terjadinya keragaman pemikiran di kalangan muslim katania, karena metode pendekatan yang berbeda dalam mengkaji ayat-ayat Alquran dan Sunnah dan *kelima*, liberalism yakni berusaha membumikan dan merasionalkan pemahaman terhadap doktrin Islam sebagai agama yang rasional dan elastis. Mengkaji pemikiran Organisasi masyarakat Islam di Aceh dengan membuat tipologi ini jauh lebih sederhana dari versi Abuddin Nata (Abuddin Nata, 2001).

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang pergulatan pemikiran Islam di Aceh dengan menganalisis terhadap tipologi pemikiran dan gerakan organisasi masyarakat Islam di Aceh setelah dibukanya kran reformasi di Indonesia dan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tipologi tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotak Umat Islam, melainkan untuk memudahkan kita dalam mengkaji berbagai warna pemikiran dalam Islam di Aceh

B. Teori Pemikiran dan Pergerakan Islam

Fazlur Rahman dalam teorinya mengenai pemikiran dan pergerakan yang berkembang di dunia Islam, ada empat tipologi pemikiran dan pergerakan Islam yang berkembang: 1) Revivalisme pra-Modernis, 2) Modernisme Klasik, 3) Neo-Revivalisme; 4) Neo-Modernisme (Rahman, Fazlur, 1985:20). *Pertama*, Revivalisme pra-Modernis. Revivalisme sering pula diartikan dengan istilah-istilah “*fundamentalism*”, “*militancy*”, “*reassertion*”, “*resurgence*”, “*activism*”, “*reconstructionism*”. Sedangkan kaum revivalis berbahasa arab menggunakan istilah “Ushuliyah-Islamiyyah” (Dasar-

dasar Islam), “Shahwahal-Islamiyyah” (KebangunanIslam), *Al-ba’atsal-Islami* (Kebangkitan Islam). (Hrair Dekmejian, 1985: 4)

Menurut Fazlur Rahman, kelompok Revivalisme pra-Modernis ini pertama muncul pada abad ke-18 yang diwakili oleh Wahabiyah di Saudi Arabia dan Sanusiyah di Afrika Utara. Visi dan misi gerakan tersebut adalah: 1) prihatin terhadap kemerosotan umat Islam; 2) kembali pada Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, membuang takhayul, bid’ah dan khurafât; 3) reinterpretasi terhadap konsep takdir yang salah selama ini; dan 4) perlawanan bersenjata, jika diperlukan (Fazlur Rahman, 1985:23)

Menurut Esposito dalam bukunya, *Islam : The Straight Path* meski ada perbedaan-perbedaan khas dalam hal interpretasi, kerangka ideologis umum revivalisme Islam mencakup tujuh keyakinan : *Pertama*, Islam adalah pegangan hidup yang lengkap dan total. Agama integral dengan politik hukum, dan masyarakat. *Kedua*, Kegagalan masyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dan mengikuti jalan sekuler Barat, dengan ideologi dan nilai-nilai yang sekuler- materialistis. *Ketiga*, Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali pada Islam. *Keempat*, Untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum berinspirasi Barat harus digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat Muslim. *Kelima*, Meski westernisasi masyarakat dikecam, modernisasi tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima, tapi keduanya harus ditundukkan dibawah akidah dan nilai-nilai Islam,demi menjaga dari westernisasi dan sekulerisa simasyarakat Muslim. *Keenam*, Proses Islamisasi, atau lebih tepatnya re-Islamisasi, memerlukan organisasi-organisasi atau serikat-serikat Muslim yang berdedikasi dan terlatih, yang dengan contoh dan kegiatan mereka, mengajak orang lain untuk lebih taat dan organisasi orang-orang Muslim yang ingin berjihad melawan korupsi dan ketidakadilan sosial. *Ketujuh*, Revivalisme Islam menginginkan kembalinya Islam sebagai mercusuar dunia seperti yang pernah dialami dimasa lalu, dalam segala bidang, baik itu agama, politik, ekonomi, budaya, bahkan sains dan teknologi. Keinginan ini barangkali terlalu utopis, jika melihat bagaimana dominasi kekuatan dunia saat ini bukan lagi terletak pada persoalan semata-mata politik kekuasaan, yakni bagaimana negara-negara diseluruh dunia bersatu dalam satu pemimpin (khilafah), misalnya, tapi saat ini dominasi itu ada pada kekuatan

ekonomi pasar yang bahkan bisa mengalahkan kebijakan sebuah negara (John L'Esposito, 1988:93-112)

Kedua, Modernisme Klasik. muncul pada awal abad ke-19, modernis mesering juga diganti dengan istilah-istilah lain, seperti “*reformis*”, “*reawakening*”, “*renaissance*” dan “*renewal*”. Kaum modernis yang berbahasa Arab dan Urdu menggunakan istilah “*Tajdid*”, “*Ishlah*”, atau “*Salaf*” (Hrair Dekmejian, 1985:4). Menurut Fazlur Rahman, *modernism* ialah usaha (dari tokoh-tokoh muslim) untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan westernisasi yang berlangsung di dunia Islam. Usaha itu dilakukan dengan menafsirkan dasar-dasar doktrin supaya sesuai dengan semangat zaman (Fazlur Rahman, 1982: 215-6).

Ada beberapa ciri yang menandai modernism Islam yang telah dikenal luas dalam kajian-kajian terdahulu. Hamilton Gibb menitik beratkan kepada ciri “*apologetic*”. Ciri ini ditandai dengan sikap pembelaan terhadap Islam dari berbagai tantangan yang datang dari kaum kolonial dan missionaris Kristen. *Apologia* menurut Gibb, dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan keunggulan Islam atas peradaban Barat (Hamilton A.R. Gibb, 1977:68). Sementara itu Fazlur Rahman, Deliarnoer, dan Mukti Ali lebih menonjolkan karakteristik modernism pada “keharusan ijtihad”, khususnya ijtihad dalam masalah-masalah mu’amalah (kemasyarakatan) dan penolakan mereka terhadap sikap jumud (kebekuan berfikir), dan taqlid (mengikuti sesuatu tanpa pengertian) (A. Mukti Ali, 1988: 259).

Ketiga, Neo-Revivalisme. Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap pemikiran modernism klasik (demokrasi dan juga kemajuan pendidikan). Namun relasi antara kaum neo-revivalis dengan kaum modernisme klasik tidak selamanya antagonis. Ada tiga hal yang menjadi penolakan kaum neo-revivalis terhadap pemikiran kaum modernis yaitu keharaman bunga bank, *family planning* (keluarga berencana), dan tidak menutup aurat adalah dosa besar. Pemikiran ini muncul pada awal abad ke-20 di daerah Arab Timur Tengah, India-Pakistan dan juga Indonesia. Slogan gerakan neo-revivalisme adalah bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Gerakan ini dimotori oleh Al-Maududi, Khadafi, dan Imam Khumaini (Fazlur Rahman, 1985: 30-33).

Menurut Hasan Hanafi Gerakan Neo-revivalisme yang paling awal lahir adalah gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) (Hassan Hanafi, 2003:32) di Mesir yang didirikan pada 1928 oleh Hasan al-Banna, yang pada intinya ia merumuskan ideologi Ikhwanul Muslimin sebagai

ideologi yang total dan komprehensif, yang didasarkan pada tiga pandangan pokok; 1) Islam adalah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri; 2) Islam memancar dari dua sumber fundamental, yakni al-Qur'an dan Hadist; 3) Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat.

Keempat, Neo-Modernisme Pada pertengahan abad XX lahir gerakan neo-modernisme yang dipelopori oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengkritik ketiga gerakan sebelumnya yang tidak mempunyai metode khusus dalam menangani masalah-masalah yang berkembang dalam dunia Islam. Oleh karena itu, Fazlur Rahman merumuskan metodenya yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: 1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Qur'an; 2) Perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an; dan 3) Pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur'an dengan sepenuhnya memperhatikan latar belakang sosiologisnya (Muhammad Iqbal, 1994: 42).

Adapun gejala Neo-Modernisme Islam di Indonesia menurut Greg Barton, mulai terlihat pada tahun 1970-an yang dimotori oleh generasi muda terpelajar. Umumnya mereka yang berpendidikan modern, namun yang pasti mereka adalah generasi yang sudah matang pemikirannya dan dibesarkan oleh berbagai pengalaman. Gerakan Neomodernisme memperoleh ketenaran secara mengesankan setelah keluarnya statemen Nurcholish Madjid dalam seminar tunggal pada bulan Januari 1970 yang pada waktu itu menggunakan tema desakralisasi dan sekularisasi

Sementara itu, Nurcholish Madjid dalam melihat tipologi pemikiran dan pergerakan Islam yang berkembang di Indonesia ada lima tipologi pemikiran dan pergerakan Islam yang berkembang; 1) Islam tradisional; 2) Islam Modern; 3) Islam Neo-modern; 4) Islam Multi-Kultural dan 5) Islam Liberal (Nurcholish Madjid, 1996:26-28). *Pertama*, Tradisionalisme Islam. Menurut Deliar Noer Islam Tradisional adalah kelompok Islam yang masih mempertahankan tradisi sebagai bagian dari aktifitas keagamaannya. Diantara konsep keagamaan Islam tradisional adalah penolakan terhadap pembaharuan dan mempertahankan tradisi pada kondisi kebudayaan tertentu yang telah terakulturasi dengan nilai-nilai daerah tertentu dan dianggap sebagai konsep keagamaan. Tertutupnya pintu ijtihad apabila tidak ada sosok pembaharu yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (*mujtahid*) (Saifuddin Zuhri, 1982: 242). Gerakan Islam

tradisional adalah gerakan membangkitkan tradisi sebagai suatu realitas spiritual ditengah modernism (Seyyed Hossein Nasr, 1994: 191).

Kedua, Islam Moderat. Dalam pergulatan pemikiran Islam, kata moderat sering diartikan sebagai “*jalan tengah*”, yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan atau kelompok tertentu. Secara etimologis, kata “moderat” (*moderate* [Inggris]) berasal dari bahasa Latin ‘*moderare*’ yang artinya “mengurangi atau mengontrol”. Dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* kata *moderate* didefinisikan sebagai; (1) *not excessive or extreme* (2) *temperate* (3) *average ; mediocre* (4) *opposed to radical views or measures*.

Moderat dalam Islam bukan semata “sikap ketiga dan baru” tetapi juga adalah sebuah *manhāj* (metode) yang menengahi dua ekstrimitas yang saling bertentangan, dengan menolak *eksageritas* (sikap berlebihan) pada salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keberpihakan pada salah satu dari dua kutub yang bertentangan. Moderat dalam konsep Islam adalah satu prinsip yang meniscayakan setiap Muslim untuk mampu merangkul dan mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan (Muhammad Imarah, 1989: 265-269)

Ketiga, Pemikiran Islam Neo-Modern. Pengertian umum yang berkembang tentang neo-modernisme mengisyaratkan dua hal. *Pertama*, neo-modernisme dipandang sebagai keadaan sejarah setelah zaman modern. *Kedua*, neo-modernisme dipandang sebagai gerakan intelektual yang mencoba menggugat, bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern.

Gagasan-gagasan yang dilontarkan kalangan neo-modernisme pada intinya menyatakan bahwa agama, baik secara teologis maupun secara sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi. Agama lahir dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Keempat, Pemikiran Islam Multikultural. Menurut Nurcholish Madjid pemikiran Islam multikultural secara fenomenologis adalah terjadinya keragaman pemikiran di kalangan muslim, karena metode pendekatan yang berbeda dalam mengkaji ayat-ayat Alquran dan Sunnah. Beberapa tipologi pemikiran Islam multicultural antara lain: 1) Pemahaman yang fundamentalis, 2) Pemahaman teologi yang

normative, 3) Pemahaman eksklusif, 4) Pemahaman yang bersifat transformatif dan 5) Pemahaman Esoteris.

Kelima, Pemikiran Islam Liberal. Ciri liberalism Islam di Indonesia adalah berusaha membumikan dan merasionalkan pemahaman terhadap doktrin Islam sebagai agama yang rasional dan elastisitas. Liberalisme Islam di Indonesia padadasarnya menghendaki bagaimana seharusnya umat Islam memahami Islam secara komprehensif mulai dari aspek ketauhidan, syariat, muamalat dan etika. Tidak memahami Islam sebatas aspek syariat saja, karena selama ini umat Islam kebanyakan memahami Islam masih sebatas symbol-simbol.

Liberalisme Islam hadir di Indonesia tidak perlu ditakuti karena, Liberalisme pada intinya memfokuskan pada kepentingan individu manusia. Sangat jauh dari bayangan yang dikhawatirkan orang selama ini. Luthfi menjelaskan tidak ada yang perlu ditakuti dari liberalisme, karena liberalisme justru lahir dengan menyesuaikan dan menghargai sifat dasar manusia.

C. Tipologi Pemikiran Organisasi Islam Di Aceh

Kalau melihat peta pemikiran dan pergerakan Islam yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan memotret tipologi organisasi Islam yang berkembang di Aceh, tidak semua organisasi Islam di Aceh terwakili oleh tipologi pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Tipologi Rahman yang melihat pada pemikiran dan pergerakan Islam secara global tentu tidak belum bisa dijadikan acuan dalam menilai pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia terutama di Aceh. Agar dapat menganalisis dengan tepat tentang peta pemikiran dan pergerakan organisasi Islam di Aceh, maka diperlukan peta yang bersifat lokalistik ke-Indonesia-an, karena Aceh bagian dari Indonesia.

Dalam melihat tipologi pemikiran organisasi Islam di Aceh, penulis lebih condong kepada peta pemikiran Islam di Indonesia yang dibuat oleh Nurcholich Madjid. Kecendrungan ini diambil karena tipologi pemikiran dan gerakan Islam yang dibuat oleh Fazlur Rahman kurang mempunyai tempat ketika dipakai untuk melihat tipologi pemikiran organisasi masyarakat di Aceh, disamping itu organisasi masyarakat Islam di Aceh adalah bagian organisasi masyarakat Islam yang berkembang di Indonesia. Ada beberapa tipologi pemikiran organisasi Islam di Aceh antara Lain:

a. Pemikiran Islam Tradisional

Menurut Howard Federspiel, tradisionalisme di Indonesia sebagai paham yang mempertahankan nilai-nilai yang telah mapan di kalangan

umat Islam penganut madhab Shafi'i. Kelompok ini di Indonesia muncul pada abad ke-20 sebagai perlawanan terhadap pandangan-pandangan kaum modernis (Ronald Alan Lukens Bull, 1999:125-126). Kelompok tradisonalis di Indonesia terlihat dalam tradisi pesantren. Contoh *Turāth* dikalangan pesantren tidak hanya dinilai sebagai sesuatu yang harus diikuti dan ditampilkan kembali dalam kehidupan modern, tetapi telah dianggap sebagai sesuatu yang sempurna. Pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Syāfi'I dan al-Ghazālī dianggap telah menyelesaikan berbagai persoalan umat. Hal ini senada dengan apa yang telah diungkapkan Muhammed Arkoun, *taqdis al-afkār al-dīnī*, yaitu sebuah cara berpikir yang oleh Fahmi Huwaidi menyebutnya sebagai penyembahan terhadap pteks(*ubbādahal- Nusūs*) (Naquibal-Atas, 1984:90).

Dengan melihat teori yang ditulis oleh Howard Federspiel di atas, maka organisasi masyarakat yang termasuk dalam pemikiran Islam tradisional di Aceh adalah 1) HUDA (Himpunan Ulama Dayah), 2) MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh Darussalam), 3) NU (Nahdlatul Ulama), dan 4) Al-wasliyah.

1. HUDA (Himpunan Ulama Dayah)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus sejarah mencatat proses kelahiran HUDA terkait erat dengan isu perdamaian di Aceh. Kehadiran HUDA juga memiliki sejarah tersendiri dan tidak jauh berbeda dengan proses terbentuknya PUSA. Berkat hasil musyawarah pertama yang dilakukan di Makam Syiah Kuala tanggal 13-14 September 1999, yang diikuti oleh lebih kurang 600 peserta dari berbagai daerah yang ada di Aceh yang terdiri dari kalangan aktivis muda, mahasiswa, santri dan para ulama. Tercapailah sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang siap menampung aspirasi masyarakat dan berjuang menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Organisasi dimaksud diberi nama HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), didirikan di Makam Syiah Kuala Banda Aceh pada Tanggal 4 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M dan berkedudukan di Kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Firdaus, 2010:3)

Organisasi ini menjadi refleksi dari gerakan ulama dayah secara terstruktur dan terorganisir untuk ikut bagian dari perubahan situasi *socio-politico* di Aceh pasca reformasi. Disamping itu, pada awal-awal berdirinya organisasi HUDA, fokus gerakannya mewujudkan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Secara umum, isu yang dikembangkan oleh organisasi berbasis santri ini yaitu menuntut keadilan hukum bagi

korban operasi militer di Aceh, mewujudkan Aceh yang berdaulat dan bermartabat, mewujudkan syariat Islam, dan meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan referendum dan jajak pendapat. (Serambi Indoensia, 16 September 1999 dan Edward Aspinal, 2009:288)

Disamping menyoroti sosial-politik di Aceh, HUDA juga menyoroti tentang sosial-keagamaan di Aceh. Langkah kongkrit yang dilakukan HUDA adalah menolak aliran wahabi-salafi hidup di Aceh, isu yang berkembang pasca kehadiran FPI di Aceh dalam berbagai gerakan massa “amar ma’ruf nahi mungkar” yang juga mempunyai persinggungan dengan gerakan anti salafi-wahabi di tanah Jawa, termasuk ide melahirkan Islam nusantara dalam muktamar NU ke-33 di Jombang beberapa waktu lalu. Kehadiran salafi-wahabi dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran syafi’iyah-asy’ariyah maturidiyah, khususnya salafi-takfiri, yang sering menuduh “aswaja” sebagai ahlul bid’ah.

2. MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh Darussalam)

Sejarah Munculnya MUNA tidak terlepas dari konflik dan juga perdamaian antara RI dengan GAM. Menurut Tgk. Hasballah salah seorang pengurus Partai PA Aceh Besar Wacana dan lembaga MUNA sudah ada sejak sebelum perdamaian yakni pada masa konflik itu sendiri. Sebelum perdamaian cita-cita dan tujuan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah Aceh menjadi merdeka. Sebagai sebuah Negara yang merdeka dan daerah yang besyariat Islam tentu membutuhkan lembaga resmi keulamaan seperti Indonesia yang mempunyai lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan MPU di Aceh. Cita-cita semula pada saat Aceh Merdeka semua yang beratribut RI dihilangkan, maka untuk lembaga ulama sudah dipersiapkan dengan nama MUNA, jadi nama MUNA sudah ada sebelum damai (Firdaus, 2013:2).

MUNA (Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh) adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang lahir di Aceh yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dibidang sosial keagamaan. Lembaga organisasi ini lahir sebagai respon terhadap situasi eks-kombatan GAM paska konflik. Keberadaan organisasi ini diyakini akan menjawab persoalan dan kebutuhan spesifik anggota mantan GAM yang pada saat itu telah berdamai dengan RI yang membutuhkan legitimasi dari organisasi ulama yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi ulama yang telah ada di Aceh saat ini.

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Majelis Ulama Nanggroe Aceh yang disingkat MUNA lembaga Majelis Ulama Nanggroe Aceh adalah wadah yang menghimpun para ulama dan cendekiawan se-Aceh untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Aceh-Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.Majelis Ulama Nanggroe Aceh yang didirikan sebagai hasil dari Musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai wilayah di Aceh meliputi seluruh Ulama Aceh terkemuka yang mewakili 23 Kabupaten/Kota dalam Propinsi Aceh.Ulama Sebagai *Warasatul Anbiya* menjadi kewajiban untuk berperan aktif dalam membina Aqidah Umat dan membangun akhlak Masyarakat demi terwujudnya Negeri yang *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur dalam Daulah Dinul Islam* (Firdaus, 2013:5).

3. NU (Nahdlatul Ulama)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah*. (Andre Feillard, 1999:9).

Basis gerakan yang menjadi orientasi adalah sosial keagamaan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, NU pernah juga menjadi organisasi politik (partai), yakni mulai tahun 1952 sampai tahun 1983.Namun, dalam muktamar tahun 1983 di Situbondo, NU menyatakan kembali ke khittah 1926, artinya NU kembali pada orientasi awal organisasi, yakni organisasi sosial keagamaan. (Ridwan, 2004:186)

Nahdlatul Ulama(NU) pertama kali masuk ke Aceh pada tahun 1940 yang di pegang oleh mandat Tgk. H. Hasan Samalanga, yang menjabat pada waktu itu menjabat sebagai kepala Jawatan Agama Aceh yang sekarang di kenal dengan kemenag Aceh sampai pada tahun 1973 (Adli, <http://baiturrahmanonline.com/2015/04/21/nahdlatul-ulama-aceh-dari-masa-kemasa/>).Walaupun NU sudah lama di Aceh, namun organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini kurang berkembang di Aceh dan masih kalah dengan organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Al-wasyliyah. Namun sejak 10 tahun terakhir NU kembali berkembang dan sudah merambah ke seluruh wilayah Aceh.

4. Al-washliyah

Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di kota Medan, Sumatera Utara. (Syahrul AR el-Hadidhy, 2005:2-4) Ide didirikannya organisasi ini berawal dari perluasan sebuah perhimpunan pelajar yang ada di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan agama yang ada di kota Medan, yang ide awal pembentukannya dilakukan oleh pelajar-pelajar kelas tinggi MIT yang membentuk kelompok diskusi pada tahun 1928 yang mereka namakan dengan "*Debating Club*" yang tujuannya adalah untuk mendiskusikan pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari di maktab (Chalijah Hasanuddin, 1988:34-35). Setelah beberapa pertemuan dengan para ulama, dalam sebuah pertemuan di rumah Muhammad Joenoes pada 26 Oktober 1930, para pelajar dan ulama mengeluarkan keputusan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Al-Djam'iatul al-Washlijah* (Nukman Sulaiman, 1956:34-38).

Al Jam'iyatul Washliyah diperkenalkan di Aceh tidak lama setelah berdirinya organisasi masyarakat Islam tersebut. Hal ini terbukti, dengan adanya catatan dalam buku Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh yang mencantumkan 91 Madrasah Washliyah di Meulaboh Aceh Barat yang ada di Aceh hingga tahun 1936. Tidak sampai disitu, Berdasarkan apa yang termaktub dalam buku 10 tahun Darussalam juga menjadi bukti al-Washliyah mengedepankan aktifitas pendidikan dan dakwah islamiyah seperti dinyatakan bahwa sejak tahun 1951 hingga 1956 di Aceh telah berdiri 30 lembaga pendidikan agama setingkat SLTP dan SLTA dan salah satunya didirikan dengan nama PGAP Washlijah Kutatjane. Namun, pada akhir tahun 1957 semua lembaga pendidikan sejenis dihapus diseluruh Indonesia (Abdul Hafiz Harahap, Academia:2).

Sampai saat ini, Al-Washliyah di Aceh tetap *concent* terhadap pendidikan dan sosial, terbukti pada tahun 2011 Al-Washliyah telah memiliki beberapa perguruan tinggi di Aceh antarlain Sekolah Tinggi dan Ilmu Keguruan (STKIP) Al-Washliyah Banda Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIP) Al-Washliyah Banda Aceh, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Banda Aceh (Ja'far, 2011:63)

b. Pemikiran Islam Modern

Menurut Nurcholish Madjid, gerakan pemikiran Islam modern diawali oleh gerakan revivalisme pada abad ke-18 dan 19, yang menyerukan kepada umat Islam untuk memberikan penalaran terhadap Islam agar Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam melakukan gerakan reformasi dalam bidang sosial dan moral. Gerakan ini memurnikan aqidah Islam dengan cara mengantarkan umat Islam pada masa Nabi dan Khulafa urrasyidin. Gerakan ini telah membangkitkan kelompok modernis Islam. Gerakan revivalisme ini sebagai pendobrak dari penyakit TBC (Taqlid, Bid'ah dan Churafat), yang berusaha memurnikan aqidah Islam (Nurcholish Madjid, 1992:125).

Dengan melihat teori yang diberikan oleh Nurcholish Madjid, yang termasuk pemikiran Islam modern adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi masyarakat muhammadiyah bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya. Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam. Muhammadiyah berusaha menghapuskan bidah, takhayul, dan takhlik yang ada dalam masyarakat. Muhammadiyah berani melahirkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Qur'an dan hadist.

Muhammadiyah diperkenalkan di Aceh pada tahun 1923, oleh seorang pegawai pegadaian Belanda asal Sunda almarhum Djajasoearta. Namun menurut catatan, organisasi Muhammadiyah baru resmi didirikan di Banda Aceh pada tahun 1927 yang kemudian berkembang ke pesisir timur dan wilayah Aceh lainnya. Gerakan ini juga mulai melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara modern dengan mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, Muhammadiyah di Aceh juga ikut berkiprah dalam bidang politik, selain dalam bidang sosial yaitu membantu fakir miskin dan anak yatim guna memperoleh pendidikan yang layak di Aceh dan Banda Aceh khususnya. Disamping misi utamanya yaitu melakukan pemurnian ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.

c. Pemikiran Islam Fundamentalis

Menurut Jamhari dan Jajang Jahroni, Fundamentalisme Islam yaitu suatu gerakan sosial, politik dan keagamaan yang memiliki keyakinan ideologis kuat dan fanatik yang selalu mereka perjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. (Jamhari dan Jajang J., 2004:3-4) Azyumardi Azra, mengatakan Islam fundamentalis adalah kaum fundamentalis mengambil sikap perlawanan secara radikal terhadap ancaman yang dipandang mengancam

eksistensi agama dan menolak hermeneutika atau sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya (Azyumardi Azra, 1996:109-110)

Dengan melihat teori yang diberikan oleh Jamhari dan Jajang Jahroni tersebut di atas, maka yang termasuk pemikiran Islam fundamentalis di Aceh adalah 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2) Front Pembela Islam (FPI). *Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*. Secara histories HT di didirikan oleh An-Nabhani di negara Jerusalem pada tahun 1953 dengan mendirikan partai politik yang diberi nama *Hizb Al-Tahrir al-Islami*. Al-Nabhani menawarkan ideology Islam sebagai satu-satunya yang membangun partai HT. Ideologi Islam dalam hal ini juga dipahami sebagai pemikiran Islam atau (*Fikrah Islam*).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah *Hizbut Tahrir* merambah kemasyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Tujuan HTI adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Di samping itu *Hizbut Tahrir* bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui polapikir yang cemerlang. HTI berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini.

Tentang kapan masuknya HTI ke Aceh tidak ada catatan yang akurat tentang kapan masuknya HTI ke Aceh. Tidak adanya catatan yang jelas tentang masuknya HTI ke Aceh dikarenakan HTI di Aceh dalam perkembangannya tidak melalui masyarakat umum, HTI hanya beredar di kalangan mahasiswa dan cendekiawan. Di samping itu kehadiran HTI di Aceh kurang mendapatkan simpati oleh semua lapisan masyarakat Aceh terutama kalangan ulama dayah.

Kedua, Front Pembela Islam (FPI). FPI ini didirikan 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim. (Jajang Jahroni, 12 Maret 2008). Tujuan berdirinya FPI untuk menegakkan hokum Islam di negara sekuler dan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain: (1) Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil

maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. (2).Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. (3).Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam.

(Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam#Latar_belakang).

Berbicara tentang kapan FPI mulai masuk ke Aceh belum ada catatan yang jelas. Namun ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa FPI mulai masuk ke Aceh ketika FPI melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh pada 25 Desember 2004. (Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam). Sampai saat ini, organisasi masyarakat Islam FPI tersebut mempunyai anggota yang cukup banyak di Aceh, bahkan setiap kabupaten di Aceh sudah ada pengurus FPI.

D. Pergulatan Pemikiran Organisasi Masyarakat Islam di Aceh

Perbedaan ideology dan kepentingan pada masing-masing organisasi masyarakat Islam di Aceh, membuka ruang perdebatan secara tidak langsung. Perdebatan ini bisa disebut sebagai perang pemikiran (*gazwu al-fikr*), dimana setiap pihak melancarkan serangan ideologinya lewat aksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Bentuk serangan ini biasanya memberikan pembenaran padadirinya (*truth claim*) disertai menganggap “tidak benar” pihak lain yang tidak sehaluan dengannya.

Dalam analisis ini, perang pemikiran tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa kategori yang sekiranya menjadi ajang pergulatan pada masing-masing organisasi Islam tersebut.

a. Ideologi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Di sini ideologi merupakan ‘payung’ yang menjadi panduan dalam menjalankan roda organisasi. Ketika menganalisis organisasi masyarakat Islam di Aceh ini, ideologi kita pahami sebagai kerangka besar dimana organisasi itu bersandar didalamnya.

Kalau melihat ideologi organisasi masyarakat di Aceh terdapat kesulitan tersendiri. Sulit karena organisasi masyarakat Islam di Aceh melampaui batasan tipologi yang ada. Misalnya saja HUDA dan MUNA yang notabene adalah organisasi masyarakat Islam yang dibentuk oleh kalangan ulama, tentu mempunyai ideologi mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah digariskan oleh Ahlusunnah

waljama'ah. Namun kalau melihat sepak terjangnya, HUDA dan MUNA lebih condong memilih politik praktis sebagai lahan perjuangannya ketimbang tampil sebagai organisasi masyarakat Islam yang berusaha membantu masyarakat dalam memahami persoalan keagamaan seperti fiqh, tata cara beribadah, tasawuf dan aqidah.

Sedangkan NU dan Al-wasliyah lebih berideologi tradisional-moderat. Nuansa tradisional muncul karena penghargaan yang tinggi atas teks-teks klasik dan tradisi lokal. Hal ini terlihat melalui kajian-kajian kitab klasik, halaqah maupun tulisan yang banyak bersumber dari kitab-kitab kuning. Kecenderungan moderat karena Sikap NU dan Al-Wasliyah menerima pelaksanaan syari'at yang formalistik yaitu diterapkannya hukum Syari'at Islam di Aceh. Disamping itu, kedua organisasi tradisional ini lebih mengembangkan pendidikan daripada terjun ke politik praktis.

Ideologi Muhammadiyah lebih berorientasi modernis artinya melakukan pemurnian aqidah Islam dengan cara menghilangkan penyakit TBC (*Taqlid, Bid'ah dan Churafat*) di masyarakat, yang berusaha memurnikan aqidah Islam dan melakukan pemurnian ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Namun Muhammadiyah tidak keberatan terhadap Qanun Aceh yang menetapkan Akidah Ahlusunnah Waljama'ah dan Mazhab Syafi'i sebagai pegangan masyarakat Aceh asalkan ditafsirkan secara terbuka dan tidak ditafsirkan secara sempit.

Sementara, ideologi HTI menurut penulis lebih cenderung fundamentalis-utopis. Fundamentalis karena ide-ide dan system Islam pada masa permulaan (Rasulullah, al-khulafa ar-Rasyidin dan khilafah) menjadi dasar untuk diterapkan pada masa kekinian. Sehingga ada upaya mengalihkan sistem Islam pada masa permulaan ke masa modern sekarang ini. Berbagai atribut yang kental pada masa Nabi di Arab diterapkan secara apa adanya pada saat ini di Indonesia. Utopis karena berupaya memimpikan kejayaan Islam yang pernah terwujud pada masa lalu. Dan, kejayaan itu hanya bisa diwujudkan melalui sistem khilafah Islamiyyah. Kecenderungan ini juga sering disuarakan oleh HTI di Aceh. Namun HTI di Aceh kurang mempunyai pendukung, mungkin karena di Aceh telah diberlakukan syari'at Islam dan konsep HTI tentang Khilafah Islam belum bisa diterima oleh masyarakat Aceh terutama kalangan pemimpin Aceh dan ulama-ulama Dayah Aceh.

Sama halnya HTI, FPI yang berideologi fundamentalis ini kurang diterima oleh masyarakat di Aceh. Beberapa kejadian penolakan masyarakat terhadap FPI, diantaranya tidak keluarnya izin menggelar

Tabligh Akbar di Aceh oleh Pemkab Aceh pada tanggal 26 November 2015 (Jawa Pos.com, Kamis 26 November 2015), dan dilarangnya DPD FPI Aceh Timur melakukan pelantikan di Masjid Agung Darusalihin Idi, Aceh Timur.

b. agenda

Secara umum, agenda besar HUDA dan MUNA adalah implementasi syariat Islam di Aceh, memberikan legalitas yang sama terhadap pendidikan dayah maupun modern sederajat dengan pendidikan formal, melibatkan MPU dalam izin mendirikan berbagai macam usaha di Kota Banda Aceh serta mensertakan semua kalangan ulama yang ada di Kota Banda Aceh dan membentuk *draf* UU-PA maupun qanun-qanun.

Disisi lain agenda NU, Muhammadiyah dan Al-Wasliayah di Aceh lebih terfokus kepada pendidikan dan sosial. Sampai saat ini, ketiga Organisasi masyarakat Islam ini telah menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat yang paling rendah serta mendasar, keagamaan serta pendidikan tinggi. Perhatian dibidang pendidikan diusahakan sebagai pondasi pergerakan ketiga organisasi Islam tersebut serta partisipasi aktif mereka dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh.

Sementara agenda HTI dan FPI di Aceh mempunyai perbedaan. Agenda HTI adalah terwujudnya sistem khilafah secara internasional. Menurut HTI, sistem demokrasi yang hamper rata diberlakukan dinegara-negara di dunia terbukti tidak mampu menyejahterakan masyarakat. Sehingga harus digeser dan diubah menjadi system khilafah Islam (<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>). Sementara kehadiran FPI di Aceh untuk mengawal adanya penegakkan Islam yang kaffah serta realisasi Undang-undang syariah Islam di Aceh. Namun terkadang cara yang dipakai oleh FPI yang cenderung merusak dan anarkis itulah sehingga organisasi ini dimasukkan kedalam tipologi fundamentalis.

c. konsepsinegara

Tentang konsepsi negara bagi organisasi masyarakat Islam di Aceh baik organisasi masyarakat Islam Nasional maupun lokal mempunyai pandangan yang sama bahwa sistem Demokrasi Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang diberlakukan di Indonesia masih layak untuk dipertahankan. Walaupun Aceh diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah dengan diberlakukannya undang-undang Syari'at Islam dan undang-undang yang bersifat kedaerahan, namun organisasi masyarakat

Islam sepakat bahwa Aceh harus tetap dalam naungan Nasional Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, HTI memandang bahwa system Negara yang dianut di Indonesia, yakni demokrasi mempunyai banyak kelemahan. Dan menurut mereka sistem ini terbukti tidak mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Dan sistem khilafah adalah solusi terhadap sistem demokrasi yang dianggap gagal.

d. Syariat Islam

Konsepsi organisasi masyarakat Islam di Aceh tentang pemberlakuan syari'at Islam tentu tidak sama dengan konsepsi organisasi masyarakat Islam di daerah lain di Indoensia. Perbedaan konsepsi ini muncul akibat berbedanya sosial-politik di Aceh dengan daerah lain. Wacana relevan tidaknya pemberlakuan syari'at Islam di daerah Indonesia sudah tidak menarik lagi untuk diperbincangkan karena di Aceh sudah diberlakukukan syari'at Islam dengan berlandaskan pada UU No. 44 Tahun 1999 dan UU 18 tahun 2001. Lewat Undang-undang itulah berbagai aturan syariat Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Aceh.

Ketika Aceh menerapkan Syari'at Islam semua komponen masyarakat Aceh baik pemerintah, ulama, masyarakat, dan organisasi masyarakat Islam bahu membahu dalam mengawal pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Semua komponen masyarakat Aceh akan melakukan perlawanan kepada siapapun yang mengusik penerapan syari'at Islam yang telah berlaku secara kaffah (menyeluruh) di Aceh.

Dengan diberlakuannya syari'at Islam di Aceh, tipologi organisasi masyarakat Islam di Aceh menjadi kabur. Baik organisasi masyarakat Islam di Aceh yang berfikiran Islam tradisional diwakili oleh HUDA, MUNA, NU, dan Al-Washliyah, organisasi masyarakat Islam yang berfikiran Islam modern, dan organisasi masyarakat Islam yang berfikiran Islam fundamentalis yang *notabene*-nya pendukung pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, sepakat untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dengan demikian polarisasi pemikiran Islam di Aceh dalam hal pelaksanaan syari'at Islam ini tidak relevan lagi untuk digunakan, karena semua organisasi masyarakat Islam Aceh sepakat untuk mendukung penerapan syari'at Islam yang telah berlaku secara *kaffah* (menyeluruh) di Aceh. Kalaupun ada perbedaan pandangan terletak pada HTI yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam melalui sistem khilafah. sebab menurut HTI, hanya dengan sisitem khalifah inilah pelaksanaan syariat Islam bisa berjalan dengan baik.

E. Penutup

Munculnya organisasi masyarakat Islam di Aceh tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa sejarah penting di Aceh yakni dibukanya kranreformasi di Indonesia dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam 20 tahun terakhir, banyak organisasi-organisasi Islam yang muncul di Aceh, mulai dari yang lokal seperti Majelis Ulama Nagroe Aceh Darussalam (MUNA) dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), sampai yang trans-nasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), disamping memang di Aceh telah ada organisasi Islam jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan organisasi masyarakat Islam ini sangat berperan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia seperti Muhammadi-yah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Washliyah.

Dilihat dari tipologi pemikiran organisasi masyarakat Islam di Aceh terdapat tiga tipologi diantaranya *pertama*, tipologi pemikiran Islam tradisional. Organisasi masyarakat yang termasuk dalam pemikiran Islam tradisional di Aceh adalah 1) HUDA (Himpunan Ulama Dayah), 2) MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh Darussalam), 3) NU (Nahdlatul Ulama), dan 4) Al-wasliyah, *kedua*, tipologi pemikiran Islam Modern yang diwakili oleh Muhammadiyah, dan *ketiga*, tipologi pemikiran Islam Fundamenta-lis. Pemikiran Islam fundamentalis di Aceh ini diwakili oleh 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2) Front Pembela Islam (FPI). *Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).*

Namun kalau dilihat dari gerakannya, pemberian tipologi Islam tradisional, Islam modern, dan Islam fundamentalis kepada organisasi masyarakat Islam di Aceh saat ini perlu dikaji ulang, karena semua organisasi masyarakat Islam di Aceh telah melampaui batasan tipologi tersebut. Sebagai contoh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), organisasi yang lahir dari kalangan ulama Dayah yang seharusnya menjaga tradisi ajaran *ahlusunnah waljamaah* ternyata juga aktif dalam politik praktis. Sementara *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) yang bercorak fundamentalis malah ikut dalam kegiatan penolakan wahabi-salafis yang dilakukan oleh ulama Dayah bersama masyarakat. Contoh lain adalah penerimaan semua organisasi masyarakat Islam, baik Islam tradisional, Islam modern, maupun Islam fundametalis, terhadap pemberlakuan syari'at Islam secara formal di Aceh. Oleh karena itu memberikan tipologi Islam tradisional, Islam modern, dan Islam

fundamentalis kepada organisasi masyarakat Islam di Aceh saat ini sudah tidak relevan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,A.Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta : Rajawali Press, 1988.
- Adli, NU Dari Masa Kemasa <http://baiturrahmanonline.com/2015/04/21/nahdlatul-ulama-aceh-dari-masa-kemasa/>
- Bull, Ronald Alan Lukens, *A Peace full Jihad : Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*, Australia : UMI Dissertation Services, 1999.

- Dekmejian, Hrair, *Islamin Revolution : Fundamentalism in the Arab World*, Syracus : Syracus University Press, 1985.
- Esposito, John L., *Islam the Straight Parth*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin dengan judul “*Islam Warna-warni: Ragam Ekspresi menuju Jalan Lurus*,” cet. 1; Jakarta : Paramadina, 2004.
- Firdaus, *Peran Ulama HUDA Dalam Politik Pasca Orde Baru Rehab-Rekon Aceh Pasca Gempa Dan Tsunami, Pasca MoU Helsinki Hingga Sekarang*, Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2010
- Feillard, Andre, *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1999
- Hamilton A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam*, Chicago: The Chicago University press, 1977
- Haryono, Yudhie R. *Gagalnya Mazhab Islam Liberal*, Republika, 21 Maret 2001
- Hasanuddin, Chalijah. *Al-Jam’iyatul Washliyah Api Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 1988
- Imarah, Muhammad, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta : Logos, 1989.
- Ja’far, “Geliat Al-Washliyah di Negeri Syariat,” dalam *Al-Jam’iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*, ed. Ja’far Medan: Perdana Publishing dan Center for Al-Washliyah Studies, 2011.
- Jahroni, Jajang. (March 12, 2008) *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003 (Islam in Southeast Asia: Views from Within)*. University of Washington Press, ISBN-13: 978-9749511114 ISBN-10: 9749511115
- Lidle, R. William, *Politics and Culture in Indonesia*, dalam Ahmad Amir Aziz
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1992
- , et.al., *Satu Islam Sebuah Dilema*, Bandung: Mizan, 1996
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1998.
- Nasution, Harun *Pembaruan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Rahman, Fazlur, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasaini, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (penyunting), Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Ridwan, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

[www.http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/](http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/)

Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki /Front_Pembela_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam)